

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I
TAHUN 2021**



**BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-2907 9177 Fax. 021-2907 9274

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2021 dapat tersusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan secara transparan dan akuntabel. Tujuan dilaksanakannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran dan informasi secara keseluruhan tentang keberhasilan dan capaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama tahun 2021 dan memberikan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat tersusun karena bantuan dan kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja di lingkungan Badan Pengawasan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini semoga komitmen dan loyalitas kita dapat lebih ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam usaha perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan implementasi pengawasan sehingga dapat terwujud budaya pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Jakarta, **27** Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


DWIARSO BUDI SANTIARTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawasan sebagai Pengawas Internal untuk melakukan seluruh proses kegiatan yang meliputi reguler, monitoring, audit kinerja, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan sehingga kinerja yang diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik, yang berkaitan dengan pedoman pelaksana tugas pengawasan serta adanya akses kemudahan Sistem Informasi Pengawasan dalam penyampaian Laporan / Pengaduan.

Bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan efektifitas tugas tersebut, sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diharapkan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Sejalan hal tersebut diatas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2021, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari tenaga teknis yudisial berjumlah 66 orang, tenaga non teknis yudisial berjumlah 92 orang dan tenaga honorer berjumlah 16 orang dengan komposisi jabatan sebagai Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Honorer dengan rincian sebagai berikut :

A. Pejabat Struktural :

- Pejabat Eselon I : - orang
- Pejabat Eselon II : 5 orang (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
- Pejabat Eselon III : 3 orang
- Pejabat Eselon IV : 16 orang

B. Pejabat Fungsional

- Hakim Tinggi : 42 orang
- Hakim Yustisial : 24 orang
- Auditor : 31 orang
- Auditor Kepegawaian : 9 orang
- Pustakawan : 2 orang
- Pranata Komputer : 3 orang

▪ Arsiparis	: 1 orang
▪ Analisis Kepegawaian	: 2 orang
C. Staff (Fungsional Umum)	: 20 orang
D. Honorer (PPNPN)	: 16 orang

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.069 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 1.860 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi / stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 211 pengaduan dan Pengaduan Aplikasi Siwas sejumlah 998 pengaduan.

3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 (tiga) orang Hakim.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun.

4. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 284 aparat peradilan.

5. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 4 wilayah inspektorat sebanyak 53 (lima puluh tiga) satker. Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 26 satker, Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 24 satker, Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 0 satker dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 3 satker.

6. Monitoring

Badan Pengawasan telah melakukan monitoring pada 4 wilayah inspektorat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Monitoring pada Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 19 satker, Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 11 satker, Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 1 satker dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 2 satker.

7. Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2021 telah melakukan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 4 inspektorat wilayah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Satker.

Audit Kinerja pada Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 24 satker. Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 20 satker, Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 2 satker dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 3 satker.

8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (Pelaksanaan Tahun 2020) terdapat 9 satker (12,16%) memperoleh nilai A, 57 Satker (77,02%) memperoleh nilai BB, 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C.

Capaian nilai SAKIP tahun 2020 (Pelaksanaan Tahun 2021) terhadap 12 satker (16,21%) memperoleh nilai A, 53 Satker (71,62%) memperoleh nilai BB, dan 9 Satker (12,16%) memperoleh nilai B. Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah terdapat peningkatan

9. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pada tahun 2021 Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah melakukan penilaian terhadap 816 (delapan ratus enam belas) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yang terdiri dari 146 (seratus empat puluh enam) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM dan 670 (enam ratus tujuh puluh) yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Internal merekomendasikan sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja, yang terdiri dari 241 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

Tim Penilaian Nasional (TPN) Kemenpan RB menetapkan 45 (empat puluh lima) satuan kerja pada Mahkamah Agung memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) satuan kerja memperoleh predikat WBBM.

10. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatannya yaitu diantaranya Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Reviu RKA K/L,

Reviu Pelaksanaan Anggaran PBJ, Reviu Revisi Anggaran, Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBPN, Reviu Hibah, *Liaison Officer* (LO), Probity Audit, Audit PBJ dan Pemeriksaan Keuangan

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2021 Mahkamah Agung telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari 596 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp48.748.371.155,87 dengan 1.313 rekomendasi dan nilai temuan penyeroran ke kas negara sebesar Rp36.782.386.014,06 dengan status sebagai berikut:

- 1 Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.302 (99,16%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 34.138.547.186,00 (92,81%).
- 2 Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 (0,84%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 2.643. 838.828,06 (7,19%)

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2021 yang sudah dianggap selesai oleh BPK yaitu sebanyak 1.313 rekomendasi atau sebesar 100%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	vi
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	16
C. Sistematika Penyajian	19
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	20
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	20
1. Visi dan Misi	20
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
C. Rencana Kinerja Tahun 2021	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan	28
III. Akuntabilitas Kinerja	30
A. Pengukuran Kinerja	30
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	31
C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja	41
IV. Penutup.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Rencana Strategis 2020 - 2024
4. SK Kepala Badan Pengawasan tentang Tim LKjIP
5. Rencana Kinerja Tahun 2020, 2021
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen dan obyektif, guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kemanfaatan dan penyelenggaraan yang lebih baik untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengelolaan SDM

Pada tahun 2021, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang, yang terdiri dari Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan PPNPN. Jumlah aparatur pada Badan Pengawasan yang berjumlah 175 orang terdiri dari tenaga teknis yudisial 66 orang, tenaga non teknis yudisial 93 orang dan tenaga honorer 16 orang.

Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 telah mengadakan peningkatan SDM dengan cara mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Fungsional Umum untuk mengikuti Diklat dan Bimtek sebanyak 22 Diklat dan Bimtek.

Pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dapat diperinci sebagai berikut:

No	Nama Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Tujuan
1.	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	3	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
2.	Pelatihan Dasar CPNS	5	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
3.	Pelatihan "reforming the indonesian criminal procedure law; establishing a legal framework on	1	Kemenkominfo	Peningkatan Kompetensi SDM

	personal data protection In criminal investigation			
4.	Pelatihan Online Arsip Elektronik	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
5.	Bimtek Pemaparan Proposal Penelitian	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
6.	Pelatihan Online English Effective Presentation	6	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
7.	Pelatihan Sertifikasi Niaga Kepailitan dan PKPU	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
8.	Sosialisasi dan Pengarahan Teknis Kegiatan e-SPI	5	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme	2	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
10.	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	9	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
11.	Pelatihan Sertifikasi Niaga bidang HKI	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
12.	Pelatihan Online Manajemen Aset	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
13.	Pelatihan Audit Forensik Organisasi	30	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
14.	Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator (PKA)	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
15.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
16.	Pelatihan Manajemen ASN	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
17.	Diklat JF Auditor Pertama	2	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
18.	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	1	BPKP	Peningkatan Kompetensi SDM
19.	Pelatihan Audit Investigatif	5	KPK	Peningkatan Kompetensi SDM
20.	Pelatihan Training of Trainer Reguler	3	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM
21.	Pelatihan Training of Trainer Mediasi	1	Pusdiklat MA	
22.	Pelatihan Advanced Kepailitan	1	Pusdiklat MA	Peningkatan Kompetensi SDM

2. Penanganan Pengaduan

Tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sejumlah 3.069 pengaduan, dengan rincian :

A. Penanganan Pengaduan

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	1.860
2	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	211
3	Pengaduan Aplikasi Siwas	998
Jumlah		3.069

B. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		267
2.	Selesai diproses		2.802
	a. Diperiksa Tim Bawas	64	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	38	
	c. Konfirmasi	96	
	d. Klarifikasi	944	
	e. Memorandum / Delegasi Internal	144	
	f. Dijawab Surat	931	
	g. Pelaksanaan Pemantauan	106	
	h. Diarsipkan	53	
	i. Gabung berkas	418	
	j. Dicabut	8	
Jumlah		2.802	

Badan Pengawasan telah menindaklanjuti pengaduan yang masuk sejumlah 3.069 pengaduan dimana pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian sejumlah 267 pengaduan sedangkan yang telah selesai diproses sejumlah 2.802 pengaduan. data tersebut menunjukkan kinerja Badan Pengawasan dalam menyelesaikan pengaduan sebesar 91 %.

3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 (tiga) orang Hakim:

- Nama : FNN
Satuan Kerja : Hakim PTUN.Tanjung Pinang
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PTTUN Medan.
- Nama : JW
Satuan Kerja : Hakim PN.Sampang (dahulu Hakim PN.Menggala)
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PT Maluku Utara
- Nama : MJP
Satuan Kerja : Hakim PN.Pacitan (dahulu Hakim PN.Menggala)
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PT Maluku Utara.

4. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atau bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, periode Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 284 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hukuman Disiplin Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	25	23	84	132
	Hakim Ad Hoc	-	1	5	6
2	Panitera	6	5	8	19
3	Sekretaris	3	3	4	10
4	Panitera Muda	11	3	8	22
5	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6	Jurusita	1	7	2	10

7	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10	Staff	10	4	4	18
Jumlah		74	60	150	284

5. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan telah melakukan Pemeriksaan Reguler pada 4 Inspektorat Wilayah sebanyak 53 (lima puluh tiga) satker. Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 26 satker, Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 24 satker, Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 0 satker dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 3 satker.

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 92 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan antara lain Program Kerja, Evaluasi Kegiatan, Standar Pelayanan.
- b. Administrasi Perkara, temuannya sejumlah 251 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan antara lain Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang berasal dari rekening penampungan perkara belum disetor ke Bank, selisih pada penutupan seluruh pembukuan keuangan perkara.
- c. Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 201 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan antara lain Persidangan, Minutasi Berkas Perkara, Berita Acara Sidang.
- d. Administrasi Umum, temuannya sejumlah 316 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan antara lain Kedisiplinan, Laporan Kinerja, Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak melalui Bank dan disimpan dalam brankas Pengadilan, Pengadaan alat pengolah data tidak menggunakan *e-purchasing* menyebabkan adanya Indikasi kemahalan harga.
- e. Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 165 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan antara lain Penanganan Pengaduan, Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

6. Monitoring

Badan Pengawasan telah melakukan monitoring pada 4 (empat) Inspektorat Wilayah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), terdiri dari Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 19 satker, Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 11 satker, Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 1 satker dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 2 satker.

- Temuan hasil monitoring tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut
- a. Manajemen Peradilan, temuannya sejumlah 75 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu
 - Program Kerja,
 - Monev Kegiatan,
 - Standar Operasional Prosedur (SOP),
 - Notulen Rapat,
 - Pengawasan Melekat,
 - Tugas dan Wewenang Pejabat / Staff (Pembagian Tugas),
 - Laporan Bulanan,
 - Sosialisasi dan Laporan Penanganan Pengaduan,
 - Hakim Pengawas Bidang.
 - b. Administrasi Persidangan, temuannya sejumlah 74 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu
 - Jadwal Sidang tidak diinput dalam SIPP,
 - Ketidaktepatan dalam pembuatan berita acara persidangan,
 - Penyelesaian Perkara yang terlalu lama,
 - Hakim belum menandatangani berita acara sidang,
 - Biaya pemeriksaan setempat yang tidak terperinci,
 - Dalam daftar isi berkas tidak mencantumkan penunjukkan jurusita oleh panitera,
 - Terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak,
 - Terdapat pelaksanaan persidangan perkara pidana yang tidak sesuai dengan jadwal sidang,
 - Ketidaksesuaian penetapan hari sidang dengan pelaksanaan sidang,
 - Terdapat pelaksanaan sidang perkara yang tidak sesuai agenda,
 - Terdapat putusan dan penetapan yang tidak tertulis tanggal putusan / penetapan diatas materai,
 - Ketidaksesuaian penulisan tanggal sidang pembacaan sidang dalam berita acara,
 - Terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan,
 - Belum dipublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan pada situs website.
 - c. Administrasi Perkara, temuannya sejumlah 161 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu
 - SK Penetapan Panjar Perkara,
 - Ketidaksesuaian penulisan tanggal minutasidasi perkara dengan SIPP,
 - Pemberitahuan Sisa Panjar,

- Ketidaktertiban Pengisian Buku Register,
 - Pengiriman Salinan Putusan, Laporan atas Perkara yang tidak dapat diselesaikan,
 - Ketidaksesuaian dengan ketentuan antara SK Panjar Biaya dan Biaya Hak Kepaniteraan,
 - Sisa Panjar Perkara yang tidak disetor ke Kas Negara,
 - Pengelolaan Biaya (ATK),
 - Penerimaan Uang secara Tunai tidak melalui bank,
 - Ketidaktertiban Pelaksanaan Minutasi,
 - Pengelolaan Biaya Proses tidak seperti sebagaimana mestinya,
 - Jangka Waktu Penyelesaian Perkara,
 - SK Penggunaan Biaya Proses.
- d. Administrasi Umum, temuannya sejumlah 268 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu
- Sarana dan Prasarana kurang memadai,
 - Kekurangan tenaga,
 - Kedisiplinan Aparatur,
 - Penggunaan materai pada kuitansi yang tidak sesuai dengan ketentuan,
 - Laporan Keuangan belum memberikan informasi yang memadai,
 - Belum membuat BAST penyerahan barang,
 - Sasaran Kerja Pegawai belum didasarkan pada RKT,
 - Fasilitas perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan belum memadai,
 - Pembuatan Kwitansi Perjalanan Dinas belum sesuai dengan ketentuan.
- e. Kinerja Pelayanan Publik, temuannya sejumlah 94 temuan, dimana temuan tersebut didasarkan pada beberapa temuan yaitu
- Pelayanan Bantuan Hukum,
 - Standar Pelayanan Pengadilan,
 - Prosedur Pelayanan Informasi dan keterbukaan informasi belum sesuai dengan ketentuan diantaranya Laporan dan Biaya Perolehan Informasi, SK Penetapan PPID, Sosialisasi Pedoman Pelayanan Informasi, Publikasi dalam website
 - LHKPN / LHKSAN,
 - SK Meja Pengaduan,
 - Informasi Panjar Biaya Perkara,
 - Pelayanan Sidang dan Kebersihan,
 - Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan,
 - Pemukhtahiran SIPP,
 - Backup secara berkala antara aplikasi database website serta PTSP.

7. Audit Kinerja

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2021 telah melakukan Audit Kinerja dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas Kinerja Penyelesaian Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 4 Inspektorat Wilayah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) satker, yang terdiri dari Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 24 satker, Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 20 satker, Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 2 satker dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 3 satker.

Hasil Temuan Audit Kinerja yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara, meliputi :
 - a) Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara sejumlah 138 temuan
 - b) Ketaatan Penyampaian Panggilan sejumlah 102 temuan
 - c) Ketaatan Pengisian Penginputan SIPP sejumlah 58 temuan

Hasil Temuan Audit Kinerja tahun 2021 Bidang Penyelesaian Perkara sebanyak 298 temuan terdiri dari temuan terkait Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara mencapai sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) temuan (46,31%), Ketaatan Penyampaian Panggilan sejumlah 102 (seratus dua) temuan (34,23%), Ketaatan Pengisian Penginputan SIPP sejumlah 58 (lima puluh delapan) temuan (19,46%).

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Penyelesaian Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait ketepatan waktu penyelesaian perkara lebih dominan yakni mencapai 138 (seratus tiga puluh delapan) temuan (46,31%) dari 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) temuan, sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian perkara.

- 2) Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Pelaksanaan Eksekusi, meliputi:
 - a) Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi sejumlah 46 temuan
 - b) Pengujian Jumlah Permohonan Eksekusi sejumlah 29 temuan
 - c) Waktu Penyelesaian Eksekusi sejumlah 35 temuan
 - d) Teknis Pelaksanaan Eksekusi sejumlah 36 temuan
 - e) Pembebanan atas Komponen Biaya Eksekusi sejumlah 16 temuan

Hasil Temuan Audit Kinerja tahun 2021 Bidang Pelaksanaan Eksekusi sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) temuan terdiri dari Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi mencapai sejumlah 46 (empat puluh enam) temuan (28,40%), Pengujian Permohonan Eksekusi sejumlah 29 (dua puluh sembilan) temuan (17,90%), Waktu Penyelesaian Eksekusi sejumlah 35 (tiga puluh lima) temuan (21,60%), Teknis Pelaksanaan Eksekusi sejumlah 36 (tiga puluh enam) temuan (22,22%), dan Pembebanan atas Komponen Biaya Eksekusi sejumlah 16 (enam belas) temuan (9,88%).

Hasil Temuan Audit Kinerja bidang Pelaksanaan Eksekusi menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian pelaksanaan eksekusi lebih dominan yakni mencapai 46 (empat puluh enam) temuan (28,40%) dari 162 (seratus enam puluh dua), sehingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan eksekusi.

3) Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, meliputi :

- a) Kesesuaian Tarif dan Biaya Perkara sejumlah 62 temuan
- b) Kelengkapan Jumlah Panjar yang diterima sejumlah 9 temuan
- c) Penggunaan Biaya Perkara sejumlah 31 temuan
- d) Pengambilan Sisa Panjar sejumlah 31 temuan
- e) Sisa Panjar yang belum diambil para pihak sejumlah 13 temuan
- f) Pengembalian sisa perkara secara elektronik (ecourt) sejumlah 19 temuan
- g) Saldo Keuangan Perkara sejumlah 24 temuan

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) temuan terdiri dari Kesesuaian Tarif dan Biaya Perkara sejumlah 62 (enam puluh dua) temuan (32,80%), Kelengkapan Jumlah Panjar yang diterima sejumlah 9 (Sembilan) temuan (4,77%), Penggunaan Biaya Perkara sejumlah 31 (tiga puluh satu) temuan (16,40%), Pengambilan Sisa Panjar sejumlah 31 (tiga puluh satu) temuan (16,40%), Sisa Panjar yang belum diambil para pihak sejumlah 13 (tiga belas) temuan (6,88%), Pengembalian sisa perkara secara elektronik (ecourt) sejumlah 19 (sembilan belas) temuan (10,05%), Saldo Keuangan Perkara sejumlah 24 (dua puluh empat) temuan (12,70%).

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara menggambarkan bahwa temuan terkait kesesuaian dan tarif biaya perkara lebih dominan yakni mencapai 62 (enam puluh dua) temuan (32,80%) dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah – langkah guna mendorong terlaksananya kesesuaian dan tarif biaya perkara.

4) Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan, meliputi :

- a) Ketersediaan Sarana dan Prasarana sejumlah 102 temuan
- b) Pelaksanaan Survei IKM sejumlah 30 temuan

Hasil Temuan Audit Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) temuan terdiri dari Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan sejumlah 102 (seratus dua) temuan (77,27%), Pelaksanaan Survei IKM sejumlah 30 (tiga puluh) temuan (22,73%).

Hasil Temuan Pemeriksaan Audit Kinerja bidang Sarana Prasarana dan Pengukuran Kualitas Layanan menggambarkan temuan terkait ketersediaan Sarana dan Prasarana mencapai 102 (seratus dua) temuan (77,27%) dari 132 (seratus delapan belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku.

8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker Eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud untuk :

- a. Memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP.
- b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
- c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel 1.4.1 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah I

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2021)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	2	2	-	1
3	>70 – 80	BB	6	7	-	-
4	>60 – 70	B	1	-	1	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	1

Tabel 1.4.2 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah II

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2021)							
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI	DILMIL TAMA	ESELON I
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	1	1	-	-	-	1
3	>70 – 80	BB	5	4	-	2	1	6
4	>60 – 70	B	1	1	2	-	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-	-	-

7	0 – 30	D	-	-	-	-	-	-
Jumlah			7	6	2	2	1	7

Tabel 1.4.3 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah III

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2021)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	-	-	-	-
3	>70 – 80	BB	7	9	1	-
4	>60 – 70	B	2	-	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			9	9	1	0

Tabel 1.4.4 Hasil Evaluasi LKjIP pada Inspektur Wilayah IV

No	Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020 (Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2021)					
	Nilai	Kategori	PT	PTA	PT TUN	DILMIL TI
1	>90 – 100	AA	-	-	-	-
2	>80 – 90	A	1	3	-	-
3	>70 – 80	BB	3	2	-	-
4	>60 – 70	B	1	-	-	-
5	>50 – 60	CC	-	-	-	-
6	>30 – 50	C	-	-	-	-
7	0 – 30	D	-	-	-	-
Jumlah			5	5	0	0

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2019 (pelaksanaan Tahun 2020) terdapat 9 Satker (12,16%) memperoleh nilai A, 57 Satker (77,02%) memperoleh nilai BB, 7 Satker (9,45%) memperoleh nilai B, 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai C (cukup).

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020 (pelaksanaan Tahun 2021) terdapat 12 Satker (16,21%) memperoleh nilai A, 53 Satker (71,62%) memperoleh nilai BB, dan 9 Satker (12,16%) memperoleh nilai B.

Capaian nilai SAKIP tahun 2020 (pelaksanaan tahun 2021) terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 12 Satker (16,21%), dan B (baik) 9 Satker (12,06%), namun untuk kategori BB (sangat baik) terdapat penurunan dari 57 Satker (77,02%) menjadi 53 Satker (71,62%) dan untuk tahun 2019 (pelaksanaan tahun

2020) yang masuk kategori C (cukup) 1 Satker (1,35%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

9. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pada tahun 2021 Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal dalam proses pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah melakukan penilaian terhadap 816 (delapan ratus enam belas) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM yang terdiri dari 146 (seratus empat puluh enam) satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM dan 670 (enam ratus tujuh puluh) yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Internal merekomendasikan sebanyak 314 (tiga ratus empat belas) unit kerja, yang terdiri dari 241 (dua ratus empat puluh satu) diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan 73 (tujuh puluh tiga) diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

Tim Penilaian Nasional (TPN) Kemenpan RB menetapkan 45 (empat puluh lima) satuan kerja pada Mahkamah Agung memperoleh predikat WBK dan 5 (lima) satuan kerja memperoleh predikat WBBM.

10. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

No	Kegiatan	Resume Hasil Pemeriksaan
1	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2021. Catatan : Laporan Keuangan MARI tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Laporan Keuangan Semester Pertama dan Laporan Triwulan III Komprehensif Tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Oktober 2021.
2	Reviu RKA K/L	Pelaksanaan Reviu RKA K/L dilaksanakan pada unit kerja Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2021.
3	Reviu Pelaksanaan	Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan III 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi belanja telah

<p>Anggaran PBJ</p>	<p>mencapai 70,52% dari rencana penyerapannya dengan rincian sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai mencapai 76,40% senilai Rp 5.289.385.324.524 b. Belanja barang mencapai 64,57% senilai Rp 1.420.287.236.847 c. Belanja modal mencapai 53,24% senilai Rp 852.372.435.06 <p>Atas total realisasi sebesar 70,52% tersebut dikategorikan cukup tinggi karena jika penyerapan anggaran Mahkamah Agung dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp7.887.635.692.960,00 maka persentase realisasinya sudah mencapai 95,87%. Selain itu juga berdasarkan data dari spanint.kemenkeu.go.id berupa laporan peringkat realisasi belanja atas 87 K/L, Mahkamah Agung RI menduduki peringkat 6.</p> <p>Pengadaan Barang dan Jasa melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 289 paket dengan nilai Rp1.123.410.705.355,00 atau 96% dari total PBJ tender yang sudah diinput di SiRUP, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="548 1079 1390 1963"> <thead> <tr> <th>Posisi PBJ Melalui Tender</th> <th>Jumlah Paket</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021</td> <td>299</td> <td>1.379.828.543.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP</td> <td>6</td> <td>206.121.473.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP</td> <td>293</td> <td>1.173.707.070.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang belum dilelang</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang</td> <td>10</td> <td>9.381.244.000</td> </tr> <tr> <td>PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak</td> <td>289</td> <td>1.123.410.705.355</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak kurang dari 50%</td> <td>143</td> <td>554.538.545.150</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak 50% - 99%</td> <td>58</td> <td>377.773.809.895</td> </tr> <tr> <td>Progres fisik kontrak 100% (PHO)</td> <td>98</td> <td>146.564.027.528</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum diinput ke dalam SiRUP sebesar 6 paket dengan nilai Rp206.121.473.000,00. Hal ini disebabkan oleh Satuan kerja belum melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup sesuai dengan revisi DIPA terakhir. Rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menghimbau satuan kerja yang melakukan revisi DIPA terakhir agar melakukan pemutakhiran data perencanaan pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup. Tidak</p>	Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)	Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000	PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP	6	206.121.473.000	PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP	293	1.173.707.070.000	PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-	PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000	PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355	Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150	Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895	Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528
Posisi PBJ Melalui Tender	Jumlah Paket	Nilai (Rp)																													
Perencanaan PBJ melalui tender selama tahun 2021	299	1.379.828.543.000																													
PBJ melalui tender yang belum diinput di SiRUP	6	206.121.473.000																													
PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP	293	1.173.707.070.000																													
PBJ melalui tender yang belum dilelang	-	-																													
PBJ melalui tender yang masih dalam proses lelang	10	9.381.244.000																													
PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak	289	1.123.410.705.355																													
Progres fisik kontrak kurang dari 50%	143	554.538.545.150																													
Progres fisik kontrak 50% - 99%	58	377.773.809.895																													
Progres fisik kontrak 100% (PHO)	98	146.564.027.528																													

		terdapat rencana PBJ melalui tender yang belum dilelang.
4	Reviu Anggaran Revisi	Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan sesuai permintaan yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan dari 3 (tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan April 2021. b. Pengadilan Militer II-08 Jakarta dilaksanakan pada bulan Juni 2021. c. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.
5	Reviu Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP Revisi dalam	Reviu Revisi Anggaran dalam rangka Penggunaan Anggaran PNBP Tahun Anggaran 2021 atas realisasi PNBP Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Oktober 2021.
6	Reviu Hibah	Reviu Hibah dilaksanakan pada unit akuntansi penggunaan Anggaran Mahkamah Agung RI pada bulan Oktober 2021 dan satuan kerja Pengadilan Agama Curup pada bulan Januari 2021 dan Pengadilan Negeri Blitar pada bulan April 2021.
7	<i>Liaison Officer</i> (LO)	Sampai dengan semester pertama tahun 2020 diperoleh informasi melalui <i>entry meeting</i> Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2020, menurut Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI selaku Penanggungjawab pemeriksa maka diperlukan <i>Liaison Officer</i> untuk menjembatani tim pemeriksa BPK dengan <i>auditee</i> yang ada di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya agar pemeriksaan dapat berjalan efektif. Melakukan pendampingan terhadap 31 satuan kerja. Untuk itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung ditunjuk sebagai <i>Liaison Officer</i> pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu oleh tim pemeriksa BPK dengan capaian pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya untuk Mahkamah Agung RI
8	Probit Audit	Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa. Probit Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan

		bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Tahun 2021, probity audit dilaksanakan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja.
9	Audit PBJ	Audit PBJ ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan PBJ telah efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2021, Audit PBJ dilaksanakan pada 4 (empat) satuan kerja.
10	Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan keuangan difokuskan pada pelaksanaan dan tata kelola keuangan DIPA dan Keuangan Perkara tahun 2021. Pada tahun 2021 Pemeriksaan Keuangan dilaksanakan pada 8 (delapan) satuan kerja.

11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2021 Mahkamah Agung telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampai dengan Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari 596 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp48.748.371.155,87 dengan 1.311 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp36.782.386.014,06 dengan status sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.288 (98,2%) dengan nilai penilaian rekomendasi sebesar Rp31.946.564.947,16 (86,9%).
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12 (0,9%) dengan nilai sebesar Rp2.203.954.854,55 (6%).
- c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 (0,8%) dengan nilai sebesar Rp2.643.838.828,06 (7,1%).

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2021 sebanyak 1.299 rekomendasi atau sebesar 99,08%.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan;

Badan Pengawasan terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Pengawasan;
2. Inspektorat Wilayah I;
3. Inspektorat Wilayah II;
4. Inspektorat Wilayah III;
5. Inspektorat Wilayah IV.

1) Sekretariat Badan Pengawasan;

Sekretariat Badan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan penyusunan anggaran, serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja;
- d) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawasan.

2) Inspektorat Wilayah I;

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah I yang meliputi: Nanggroe

Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah I;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah I;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

3) Inspektorat Wilayah II;

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah II yang meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah II;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah II;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah II;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah II;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

4) Inspektorat Wilayah III;

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah III yang meliputi :

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah III;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah III;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah III;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah III;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah III;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

5) Inspektorat Wilayah IV.

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di Wilayah IV yang meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya (Papua).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV;
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IV;
- e) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah IV;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, finansial peradilan dan perilaku aparatur pengadilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengawasan Tahun 2020 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi

C. Sistematika Penyajian

II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

1. Visi dan Misi
2. Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahun 2021

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”, dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan serta mempertahankan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, melakukan Reviu atas Laporan Keuangan dan Perencanaan Keuangan.

1. Visi dan Misi

Visi yang telah ditetapkan Badan Pengawasan adalah ”Terwujudnya aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa”.

Untuk memenuhi Visi tersebut, Badan Pengawasan menjabarkannya kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding dibidang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-RI

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan efektif dan efisien.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu		
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan		
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu		
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti		
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti		
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu		
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler		
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja		
	Pemeriksaan Barang dan Jasa		
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas		
	Pemeriksaan Probitiy		
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan	
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan		

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengawasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya penanganan pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti;	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan,

yang transparan, efektif dan efisien		dengan jumlah pengaduan yang masuk ditambah dengan jumlah sisa pengaduan tahun lalu (x 100%);		semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu;	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan Triwulan website dari Ortala
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan;	Jumlah hukuman disiplin yang dipublikasi dibagi dengan jumlah hukuman disiplin (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan Bulanan website dari Ortala
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu.	Jumlah hasil pemeriksaan kasus tepat waktu dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan kasus (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti;	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti;	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti di bagi dengan jumlah rekomendasi (x 100%);	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu.	Jumlah laporan hasil pengawasan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan hasil pengawasan (x 100%)	Badan Pengawasan	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV

C. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2021 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2021 Badan Pengawasan menetapkan komitmen kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Badan Pengawasan MA RI Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	1077, 1078, 5258, 5259 Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah	001 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%				75%	-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%				100%	-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%				100%	Rp3.245.573.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%			001 Jumlah LHP Pengawasan di lingkungan Inspektorat wil I, II, III, IV	80%	-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%				80%	Rp 89.059.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%				100%	-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%				100%	Rp1.904.508.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%				100%	Rp1.761.058.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%				100%	Rp 207.480.000
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100%				100%	Rp 1.593.600.000
	Pemeriksaan Probitiy	100%				100%	Rp 201.594.000
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100%				100%	Rp 13.285.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%				100%	Rp 320.650.000
							1079 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan

dicapai pada tahun 2021, maka dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengawasan dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan dan Inspektur Wilayah I sampai dengan IV Badan Pengawasan dengan Kepala Badan Pengawasan.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021.

1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp3.245.573.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 89.059.000
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp1.904.508.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp1.761.058.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 207.480.000
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100%		Rp1.593.600.000
	Pemeriksaan Probity	100%	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 201.594.000
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100%		Rp 13.285.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%		Rp 320.650.000

Jumlah Anggaran : **Rp9.336.807.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang diselesaikan	80%	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	Rp 89.059.000
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100%		Rp 13.285.000
	Pemeriksaan Probity	100%		Rp 201.594.000

Jumlah Anggaran : **Rp303.938.000,-**

Program : Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

3. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

Tabel 2.4.3 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase Penanganan Pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp 872.512.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp 386.877.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp 547.937.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 67.888.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%		Rp 33.064.000

Jumlah Anggaran : **Rp1.908.278.000,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

4. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

Tabel 2.4.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.004.506.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp 530.621.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp 342.187.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 49.396.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%	Rp 200.000.000	
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100%	Rp1.593.600.000	

Jumlah Anggaran : **Rp3.720.310.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

5. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

Tabel 2.4.5 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan	-

pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%	Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp 901.669.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp 696.368.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp 619.775.000
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 40.452.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%		Rp 40.914.000

Jumlah Anggaran : **Rp2.299.178.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

6. Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

Tabel 2.4.6 Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100%		Rp 466.886.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100%		Rp 290.642.000
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100%		Rp 251.159.000

manajemen peradilan dan administrasi umum	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100%		Rp 49.744.000
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100%		Rp 46.672.000

Jumlah Anggaran : **Rp1.105.103.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan.

E. Capaian Kinerja Badan Pengawasan

Perbandingan capaian kegiatan Badan Pengawasan tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2020

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Capaian	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Pemeriksaan Kasus	37	74	30	14	155	175 LHP	88,57%
Pemeriksaan Reguler	14	11	16	11	52	55 LHP	94,54%
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	30	31	35	17	113	116 LHP	97,41%
Pemeriksaan Monitoring	25	27	20	13	85	88 LHP	96,59%
Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	16	17	15	9	57	61 LHP	93,44%
Pemeriksaan Kepegawaian	3	2	3	3	11	4 LHP	275%
Coconsulting Probity Audit	-	1	-	-	1	1 LHP	100%
Probity Audit PBJ	11	1	11	-	23	23 LHP	100%
Pemeriksaan Lintas Provinsi / Tujuan Tertentu / Cek Fisik / Saber Pungli / Investigasi / Unit Intelijen / SIDAK	12				12	12 LHP	100%
TLHP BPK	13				13	13 LHP	100%
LO Pendampingan	9				9	1 LHP	900%
IACM	1				1	1 Kegiatan	100%
Reviu PIPK	1				1	1 Kegiatan	100%
TOTAL							173%

Capaian kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2020 melebihi target yang direncanakan dari target 100% yaitu 173%.

Tabel 2.5.2 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2021

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah Capaian	Target	Persentase
	I	II	III	IV			
Pemeriksaan Kasus	16	39	13	10	78	88 LHP	88,63%
Pemeriksaan Reguler	13	19	15	6	53	42 LHP	126,19%
Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas		314			314	161 LHP	195%
Pemeriksaan Monitoring	9	11	7	6	33	29 LHP	113,79%

Pemeriksaan Kinerja dan Integritas	16	13	15	5	49	46 LHP	106%
Pemeriksaan Kepegawaian	6	13	2	1	22	8 LHP	275%
Probit Audit PBJ	11	12	5	-	28	10 LHP	280%
Pemeriksaan Lintas Provinsi / Tujuan Tertentu / Cek Fisik / Saber Pungli / Investigasi / Unit Intelijen / SIDAK	18				18	10 LHP	180%
TLHP BPK	9				9	4 LHP	225%
LO Pendampingan	18				18	4 LHP	450%
IACM	2				2	1 Kegiatan	200%
Reviu PIPK	2				2	2 Kegiatan	100%
TOTAL							195%

Capaian kinerja Badan Pengawasan selama tahun 2021 melebihi target yang direncanakan dari target 100% yaitu 195%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% (3.069 pengaduan)	100%
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%	68% (2.802 pengaduan)	91%
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100%	100% (284 orang)	100%
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100% (78 LHP)	72% (56 LHP)	72%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80% (29 LHP)	91% (33 LHP)	114%
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%	79% (1.302 rekomendasi)	99%
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100% (42 LHP)	126% (53 LHP)	126%
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	100% (42 LHP)	126% (53 LHP)	126%
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	100% (46 LHP)	106% (49 LHP)	106%
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100% (4 LHP)	100% (4 LHP)	100%

	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100% (161 LHP)	195% (314 satker)	195%
	Pemeriksaan Probitas	100% (10 LHP)	280% (28 LHP)	280%
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100% (2 LHP)	100% (2 LHP)	100%
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengawasan dalam melaksanakan Misi yang menjadi tanggung jawab organisasi, telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerjanya, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.	100% (3.569 pengaduan)	100% (3.569 pengaduan)	100%	100% (3.069 pengaduan)	100% (3.069 pengaduan)	100%

Pada Tahun 2021 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.069 pengaduan dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti sehingga capaian kinerjanya 100%, tindaklanjut atas surat pengaduan tersebut dapat diperinci sebagai berikut: Pengaduan masih proses penyelesaian 267 Pengaduan dan Pengaduan yang selesai diproses 2.802 pengaduan yaitu diperiksa Tim Bawas 64 pengaduan, delegasi ke Tingkat Banding 38 pengaduan, Konfirmasi 96 pengaduan, Klarifikasi 944 pengaduan, Memorandum / Delegasi Internal 144 pengaduan, dijawab Surat 931 pengaduan, Pelaksanaan Pemantauan 106 pengaduan, diarsipkan 53 pengaduan, Gabung Berkas 418 pengaduan, dicabut 8 pengaduan.

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen, sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Instrumen penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan diantaranya adanya optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (*E-post*). Disamping itu adanya kemudahan Aplikasi SIWAS bagi masyarakat dalam penyampaian pengaduan, sehingga kinerja dari Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada

akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Indikator kinerja ke-2 : Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu	75%	45% (2.137 pengaduan)	60%	75%	68% (2.802 pengaduan)	91%

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan dalam penanganan pengaduan telah selesai diproses sejumlah 2.802 surat pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Tindaklanjuti	Jumlah
1	Diperiksa Tim Bawas	64
2	Delegasi ke Tingkat Banding	38
3	Konfirmasi	96
4	Klarifikasi	944
5	Memorandum / Delegasi Internal	144
6	Dijawab Surat	931
7	Pelaksanaan Pemantau	106
8	Diarsipkan	53
9	Gabung berkas	418
10	Dicabut	8
Jumlah		2.802

Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tersebut terdapat 2.802 pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu dari jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan yaitu sejumlah 3.069 pengaduan sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator kinerja persentase penanganan pengaduan yang tepat waktu pada tahun 2021 meningkat 31 % dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan adanya optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (*E-post*). Disamping itu pada proses tindak lanjut pengaduan berupa klarifikasi sudah menggunakan aplikasi SIWAS sehingga lebih cepat ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait/ terlapor. Demikian juga pada proses jawab surat pengaduan menjadi lebih optimal dengan adanya aplikasi *E-post*. Dengan adanya optimalisasi aplikasi SIWAS dan *E-post* tersebut terbukti memberikan dukungan percepatan pelayanan penanganan pengaduan dan meningkatkan tata kelola hasil pemeriksaan pengaduan.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	100% (162 orang)	100% (162 orang)	100%	100% (284 orang)	100% (284 orang)	100%

Pada tahun 2021 aparat peradilan yang dikenakan sanksi berasal dari pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu sejumlah 284 orang, dengan rincian hukuman disiplin berat 74 orang, hukuman disiplin sedang 60 orang, hukuman disiplin ringan 150 orang. Dari jumlah tersebut persentase terbesar aparat yang dijatuhi hukuman disiplin adalah hakim / hakim ad hoc sejumlah 138 orang (48,59%).

Jika dibandingkan dengan jumlah hukuman disiplin tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 122 orang, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen dari pimpinan Mahkamah Agung RI yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik. Disamping itu didukung oleh semakin efektifnya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan kepada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Tabel 3.2 Hukuman Disiplin Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah Hukuman Disiplin			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	25	23	84	132
	Hakim Ad Hoc	-	1	5	6
2	Panitera	6	5	8	19
3	Sekretaris	3	3	4	10
4	Panitera Muda	11	3	8	22
5	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6	Jurusita	1	7	2	10
7	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10	Staff	10	4	4	18
Jumlah		74	60	150	284

Indikator kinerja ke-4 : Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	100% (175 LHP)	44% (77 LHP)	44%	100% (78 LHP)	72 % (56 LHP)	72%

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menindaklanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, baik melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan maupun melalui delegasi Tingkat Banding, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 78 laporan dengan jumlah LHP yang tepat waktu sebanyak 56 LHP. Dengan demikian, capaian kinerja persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu mencapai 72 % sehingga kurang dari target yang ditetapkan.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dari hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tersebut yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah menandakan kinerja dari Badan Pengawasan setiap tahunnya. Dimana, capaian kinerja tahun 2021 meningkat 31 % jika dibandingkan dengan tahun 2020. Capaian tersebut dikarenakan adanya peningkatan kinerja tim pemeriksa badan pengawasan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta adanya peningkatan jumlah tim pemeriksa sehingga lebih banyak pemeriksaan pengaduan yang dapat dilaksanakan.

SASARAN 2 : Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif.

Indikator kinerja ke-1 : Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	80%	100% (85 LHP)	125%	80% (29 LHP)	91% (33 LHP)	114%

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan telah merekomendasikan hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti yaitu berupa Pemeriksaan Monitoring sejumlah 33 Satker dengan capaian kinerja 114% yaitu sebagai tindaklanjut dari temuan atas Pemeriksaan Reguler. Pemeriksaan monitoring dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan pemantauan sejauh mana temuan dalam pemeriksaan reguler dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja untuk melakukan perbaikan kedepan.

Realisasi pemeriksaan monitoring tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 namun demikian jika dilihat dari capaian, maka target kinerja 2021 dapat dicapai. Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan monitoring pada 33 Satuan Kerja (Satker) sebagai berikut :

Tabel Data Pemeriksaan Monitoring Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	6	7	3	3	19
Peradilan Agama	2	4	4	1	11
Peradilan Militer	-	-	-	1	1
Peradilan TUN	1	-	-	1	2
Total	9	11	7	6	33

Tabel Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Monitoring Tahun 2021

No	Bidang	Jumlah Temuan	Keterangan
1	Manajemen Peradilan	75	Program Kerja, Monev Kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Notulen Rapat, Pengawasan Melekat, Tugas dan Wewenang Pejabat / Staff (Pembagian Tugas), Laporan Bulanan, Sosialisasi dan Laporan Penanganan Pengaduan, Hakim Pengawas Bidang.
2	Administrasi Persidangan	74	Jadwal Sidang tidak diinput dalam SIPP, Ketidaktelitian dalam pembuatan berita acara persidangan, Penyelesaian Perkara yang terlalu lama, Hakim belum menandatangani berita acara sidang, Biaya pemeriksaan setempat yang tidak terperinci, Dalam daftar isi berkas tidak mencantumkan penunjukkan jurusita oleh panitera, Terdapat biaya penyerahan salinan putusan kepada para pihak, Terdapat pelaksanaan persidangan perkara pidana yang tidak sesuai dengan jadwal sidang, Ketidaksesuaian penetapan hari sidang dengan pelaksanaan sidang, Terdapat pelaksanaan sidang perkara yang tidak sesuai agenda, Terdapat putusan dan penetapan yang tidak tertulis tanggal putusan / penetapan diatas materai, Ketidaksesuaian penulisan tanggal sidang pembacaan sidang dalam berita acara, Terdapat beberapa amar dalam berita acara sidang tidak sama dengan amar dalam putusan, Belum dipublikasikan daftar radius wilayah dan biaya pemanggilan pada situs website.
3	Administrasi Perkara	161	SK Penetapan Panjar Perkara, Ketidaksesuaian penulisan tanggal minutasi perkara dengan SIPP, Pemberitahuan Sisa Panjar, Pemungutan Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar, Ketidaktertiban Buku Register, Pengiriman Salinan Putusan, Laporan atas Perkara yang tidak dapat diselesaikan, Ketidaksesuaian dengan ketentuan antara SK Panjar Biaya dan Biaya Hak Kepaniteraan, Sisa Panjar Perkara yang tidak disetor ke Kas Negara, Pengelolaan Biaya (ATK), Penerimaan Uang secara Tunai tidak melalui bank, Ketidaktertiban Pelaksanaan Minutasi, Pengelolaan Biaya Proses tidak seperti sebagaimana mestinya, Jangka Waktu Penyelesaian Perkara, SK Penggunaan Biaya Proses
4	Administrasi Umum	268	Sarana dan Prasarana kurang memadai, Kekurangan tenaga, Tidak disiplin (dalam penggunaan tanda pengenal), Jadwal Piket belum ada, Kedisiplinan Kehadiran blm maksimal, Terdapat kwitansi dimana materai tidak diberikan dengan sesuai waktu tanda tangan, Laporan Keuangan belum memberikan informasi yang memadai, Belum membuat BAST penyerahan barang, Sasaran Kerja Pegawai yang disusun oleh Hakim dan Pegawai tidak bersadarkan RKT, Fasilitas perpustakaan belum ada dan pengelolaan perpustakaan belum maksimal, Kwitansi Perjalanan Dinas tidak mencantumkan tempat asal dan tempat tujuan
5	Kinerja Pelayanan Publik	94	Pelayanan Bantuan Hukum, Standar Pelayanan Pengadilan, Laporan dan Biaya Perolehan Informasi, LHKPN / LHKS, SK Meja Pengaduan, Sosialisasi Pedoman Pelayanan Informasi, Format Formulir Pelayanan Informasi, Informasi Panjar Biaya Perkara, Pelayanan Sidang dan Kebersihan, SK Penetapan PPID, Prosedur dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan, Pemukhtahiran SIPP, Prosedur Pelayanan dan Keterbukaan Informasi, Pengungkahan (Publikasi) dalam website, Backup secara berkala antara aplikasi database website serta PTSP, Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi.

Indikator kinerja ke-2 : Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	80%	79% (1.083 rekomendasi)	99%	80%	79% (1.302 rekomendasi)	99%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Mahkamah Agung (MA). Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab pejabat yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3).

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan kendala instansi dalam melaksanakan rekomendasi BPK. Sasaran pemantauan atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pemeriksaan adalah ketepatan/kesesuaian instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Tahun 2021 Mahkamah Agung telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sampaidengan Semester II Tahun 2021 yang terdiri dari 596 temuan dengan nilai temuan sebesar Rp48.748.371.155,87 dengan 1.313 rekomendasi dan nilai temuan penyetoran ke kas negara sebesar Rp36.782.386.014,06 dengan status sebagai berikut:

- 1 Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.302 (99,16%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 34.138.547.186,00 (92,81%).
- 2 Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 11 (0,84%) dengan nilai penyelesaian rekomendasi sebesar Rp 2.643. 838.828,06 (7,19%)

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2021 yang sudah dianggap selesai oleh BPK yaitu sebanyak 1.313 rekomendasi atau sebesar 100%.

Indikator kinerja ke-3 : Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	100% (52 LHP)	100% (52 LHP)	100%	100% (42 LHP)	126% (53 LHP)	126%

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan Pengawasan yaitu berupa Pengawasan Reguler sejumlah 53 Satuan Kerja (Satker) dengan capaian kinerja 126%.

Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 53 (lima puluh tiga) Satuan Kerja, yaitu pada peradilan umum sejumlah 26 Satker, peradlan agama sejumlah 24 Satker, peradlan militer sejumlah 0 Satker, peradlan TUN sejumlah 3 Satker. Pemeriksaan reguler pada tahun 2021 realisasi meningkat 26% dibandingkan dengan tahun 2020, untuk laporan hasil pengawasan yang tepat waktu pada tahun 2021 yaitu 100%.

SASARAN 3 : Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel

Indikator kinerja ke-1 : Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Pengadilan yang sudah dilakukan pengawasan reguler	100% (55 LHP)	94% (52 LHP)	94%	100% (42 LHP)	126% (53 LHP)	126%

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan pengawasan reguler terhadap 53 Satker, dimana dalam pelaksanaan pengawasan reguler tersebut sudah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 42 satker dengan capaian kinerja 126%.

Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Reguler tersebut yaitu pada Lingkungan Peradilan Umum berjumlah 26 satker. Lingkungan Peradilan Agama berjumlah 24 satker. Lingkungan Peradilan Militer berjumlah 0 satker, dan Lingkungan Peradilan TUN berjumlah 3 satker. Dibandingkan pelaksanaan pengawasan reguler pada tahun 2020 dimana target yang ditetapkan sejumlah 55 satker dengan realisasi 52 satker dan capaian kinerja 94% sehingga tahun 2021 capaian kinerja untuk pengawasan regular meningkat dibandingkan dengan tahun 2020.

Indikator kinerja ke-2 : Pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan audit kinerja.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Pengadilan yang sudah dilakukan pemeriksaan audit kinerja	100% (61 LHP)	93% (57 LHP)	93%	100% (46 LHP)	106% (49 LHP)	106%

Badan Pengawasan sebagai pengawas Internal pada tahun 2021 telah melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas sejumlah 49 Satuan Kerja (Satker), melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 46 satker dengan capaian kinerja 106%.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan mengukur Kinerja Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pelayanan Peradilan pada 49 (empat puluh sembilan) Satker sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para pencari keadilan. Adapun rincian jumlah satker yang dilakukan pemeriksaan audit kinerja dan integritas pada tahun 2021 adalah Peradilan Umum berjumlah 24 Satker, Peradilan Agama berjumlah 20 Satker, Peradilan TUN berjumlah 3 Satker dan Peradilan Militer berjumlah 2 satker.

Tahun 2021 Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas untuk target dan realisasi menurun dibandingkan tahun 2020, namun demikian untuk pencapaian kinerja telah melampaui pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu 109%, sehingga kinerja Badan Pengawasan dapat tercapai.

Indikator kinerja ke-3 : Pemeriksaan Barang dan Jasa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Pemeriksaan Barang dan Jasa	100% (23 Satker)	100% (23 Satker)	100%	100% (4 satker)	100% (4 satker)	100%

Pada tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada 4 satker dan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 4 satker, dengan capaian kinerja 100 %.

Adapun perincian dari pelaksanaan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada wilayah I berjumlah 1 satker, pada wilayah II berjumlah 1 satker, pada wilayah III berjumlah 1 satker, dan pada wilayah IV berjumlah 1 satker.

Indikator kinerja ke-4 : Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	100% (116 Satker)	97% (113 Satker)	97%	100% (161 satker)	195% (314 satker)	195%

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan telah melakukan pelaksanaan penilaian Zona Integritas terhadap 314 Satker yang diusulkan ke Kemenpan RB, telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 161 satker dengan capaian kinerja 195%.

Pelaksanaan penilaian zona integritas dilakukan secara desk evaluasi melalui aplikasi PMPZI Mahkamah Agung. Adapun penilaian zona integritas terhadap 314 satker terdiri dari penilaian WBK sejumlah 241 satker dan penilaian WBBM sejumlah 73 satker.

Berdasarkan tipe satuan kerja yang dilakukan penilaian WBBM

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Unit Eselon 1	1	1,38%
2	Tingkat Banding	17	23,28%
3	Tingkat Pertama	55	75,34%
	TOTAL	73	100%

Berdasarkan kamar peradilan yang dilakukan penilaian WBBM

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peradilan Umum	21	28,76%
2	Peradilan Agama	47	64,38%
3	Peradilan Militer dan TUN	5	6,84%
	TOTAL	73	100%

Berdasarkan tipe satuan kerja yang dilakukan penilaian WBK

NO	TIPE UNIT KERJA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Unit Eselon 1	2	0,83%
2	Tingkat Banding	21	8,71%
3	Tingkat Pertama	218	90,46%
	TOTAL	241	100%

Berdasarkan kamar peradilan yang dilakukan penilaian WBK

NO	KAMAR PERADILAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Peradilan Umum	97	40,25%
2	Peradilan Agama	128	53,11%
3	Peradilan Militer dan TUN	16	6,64%
	TOTAL	241	100%

Indikator kinerja ke-5: Pemeriksaan Probity

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Pemeriksaan Probity	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100%	100% (10 LHP)	280% (28 LHP)	280%

Badan Pengawasan sebagai auditor internal mempunyai peran untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, serta memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola proses bisnis organisasi, salah satunya terkait pengadaan barang/jasa. Probity Audit dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tenderkan sampai dengan pekerjaan selesai, hal tersebut untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta untuk memenuhi ketentuan peraturan/perundangan yang berlaku. Tahun 2021, probity audit dilaksanakan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja.

Indikator kinerja ke-6 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terlaksana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	100% (1 LHP)	100% (1 LHP)	100%	100% (2 LHP)	100% (2 LHP)	100%

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim, Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 (tiga) orang Hakim:

- Nama : FNN
Satuan Kerja : Hakim PTUN.Tanjung Pinang
Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PTTUN Medan.
- Nama : JW

- Satuan Kerja : Hakim PN.Sampang (dahulu Hakim PN.Menggala)
 Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PT Maluku Utara
- Nama : MJP
 Satuan Kerja : Hakim PN.Pacitan (dahulu Hakim PN.Menggala)
 Hukuman Disiplin : Sanksi berat berupa Hakim Non Palu selama 2 (dua) tahun di PT Maluku Utara.

Indikator kinerja ke-7 : Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2020			2021		
1	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%	100% (74 LHE)	100% (74 LHE)	100%

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2020 (pelaksanaan Tahun 2021) terdapat 12 Satker (16,21%) memperoleh nilai A, 53 Satker (71,62%) memperoleh nilai BB, dan 9 Satker (12,16%) memperoleh nilai B.

Capaian nilai SAKIP tahun 2020 (pelaksanaan tahun 2021) terhadap 74 satuan kerja Eselon 1 dan Pengadilan Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk nilai SAKIP yang masuk kategori A (memuaskan) yaitu 12 Satker (16,21%), dan B (baik) 9 Satker (12,06%), namun untuk kategori BB (sangat baik) terdapat penurunan dari 57 Satker (77,02%) menjadi 53 Satker (71,62%) dan untuk tahun 2019 (pelaksanaan tahun 2020) yang masuk kategori C (cukup) 1 Satker (1,35%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat.

C. Akuntabilitas Anggaran Kinerja

Dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp24.745.576.000,- telah direalisasi sebesar Rp23.819.019.933,- atau 96,26%. Rincian realisasi anggaran kegiatan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Realisasi anggaran kegiatan Badan Pengawasan MA RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Terwujudnya penanganan pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	-	-

yang transparan, efektif dan efisien	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	-	-	-
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	-	-	-
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	Rp3.245.573.000	Rp3.170.215.581	97,67%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	-	-	-
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	Rp89.059.000	Rp89.058.915	99,99%
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	-	-	-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Jumlah pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	Rp1.904.508.000	Rp1.882.848.762	98,86%
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan Audit Kinerja	Rp1.761.058.000	Rp1.695.611.091	96,28%
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	Rp 207.480.000	Rp 130.984.684	63,13%
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	Rp1.593.600.000	Rp1.584.935.605	99,45%
	Pemeriksaan Probitas	Rp 201.594.000	Rp 201.593.893	99,99%
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	Rp 13.285.000	Rp 13.284.120	99,99%
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	Rp 320.650.000	Rp 296.990.427	92,62%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 117,35%, maka realisasi anggaran sebesar 60,57% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.2 Efisiensi Anggaran Kegiatan Badan Pengawasan MA RI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	% EFISIENSI
1	2	3	4	5
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	-	68%	68%
	Persentase Hukuman Disiplin yang dipublikasikan	-	100%	100%
	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus yang tepat waktu	97,67%	72%	-25,67%
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti	-	91%	91%
	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti	99,99%	79%	-20,99%
	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	-	126%	126%

Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	98,86%	126%	27,14%
	Pengadilan yang dilakukan Pemeriksaan Audit Kinerja	96,28%	106%	9,72%
	Pemeriksaan Barang dan Jasa	63,13%	100%	36,87%
	Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas	99,45%	195%	95,55%
	Pemeriksaan Probitiy	99,99%	280%	180,01%
	Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang terlaksana	99,99%	100%	0,01%
	Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	92,62%	100%	7,38%
JUMLAH		847,98%	1643%	795,02%
RATA-RATA		60,57%	117,35%	56,78%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun Renstra tahun 2020 - 2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum capaian kinerja Badan Pengawasan tahun 2021 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya.

Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan mencapai target-target tersebut, dalam penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan/akuntabel karena adanya kesesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi, dimana serapan anggarannya mencapai 96,26%, dengan demikian kinerja Badan Pengawasan tahun 2021 dapat disimpulkan baik.

B. Saran

Hasil yang telah diperoleh agar dapat dipertahankan dan bahkan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.